

## Basement Apartemen di Serpong Kebanjiran, Mobil-mobil Terendam

**TANGSEL (IM)** - Parkiran basement di salah satu apartemen wilayah Serpong, Tangerang Selatan, tergenang banjir. Beberapa mobil yang terparkir di basement pun terendam air.

Dalam video yang beredar, Kamis (28/12), beberapa mobil tampak terparkir di basement tersebut. Banjir yang ada hampir menutupi ban mobil tersebut.

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat mengatakan, banjir terjadi pada Rabu (27/12). Banjir terjadi lantaran tanggul yang jebol. Banjir yang menggenangi basement tersebut mencapai ketinggian 1 meter.

"Diakibatkan luapan air sungai yang berada di sekitaran apartemen, mengakibatkan tanggul jebol dan merendam parkiran basemen mobil dan motor pukul 16.30 WIB den-

gan ketinggian air sekitar kurang lebih 110 cm," kata Ujat dalam keterangannya, Kamis (28/12).

Sejumlah mobil yang terparkir di sana terendam air. Hingga kini, air banjir masih menggenangi basement apartemen. "Aset kendaraan bermotor milik penghuni dan manajemen SG apartemen. Iya masih (tergenang)," ujarnya.

Ujat menambahkan, BPBD saat ini masih berupaya untuk mengatasi genangan air yang ada. Selain itu, lanjut dia, pihaknya memperbaiki tanggul yang jebol.

"Upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Tangerang membantu perbaikan tanggul sementara, melakukan tindakan yang diperlukan sesuai standar operasional (SOP) Kebencanaan, melakukan koordinasi dengan pihak manajemen," imbuhnya. ● pp

## Longsor Terjang 5 Lokasi di Tangsel, 1 Korban Luka

**TANGSEL (IM)** - Longsor menimpa 5 lokasi yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Imbasnya sejumlah rumah mengalami kerusakan hingga menyebabkan salah satu warga dievakuasi karena mengalami luka-luka.

Longsor itu terjadi setelah hujan deras mengguyur pada Rabu (27/12) sore. Kelima lokasi yang diterjang longsor yakni di RT04 RW02 Kelurahan Muncul. Setidaknya 2 rumah rusak berat dan 1 lainnya terdampak rusak ringan.

"Sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Penyebabnya hujan dengan intensitas tinggi. Tanah longsor dengan panjang kurang lebih 10 meter dan tinggi sekira 8 meter," terang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel, M Faridzal Gumay, Kamis (28/12).

Lokasi longsor kedua berada di Jalan Akses TPBU Kampung Sengkol. Di lokasi ini material tanah menutup akses jalan. Proses evakuasi longsor itu telah dilakukan berkoordinasi dengan unsur kewilayahan.

Lokasi longsor kedua berada di Jalan Akses TPBU Kampung Sengkol. Di lokasi ini material tanah menutup akses jalan. Proses evakuasi longsor itu telah dilakukan berkoordinasi dengan unsur kewilayahan.

Lokasi longsor kedua berada di Jalan Akses TPBU Kampung Sengkol. Di lokasi ini material tanah menutup akses jalan. Proses evakuasi longsor itu telah dilakukan berkoordinasi dengan unsur kewilayahan.

"Dua rumah rusak berat dan 2 rumah lain rusak ringan. Ada 1 korban luka. Korban luka sudah dievakuasi ke Puskesmas terdekat," pungkasnya. ● pp

## Pj Wali Kota Tangerang Minta Pegawai Siapkan Program 2024

**TANGERANG (ANTARA)** - Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin meminta kepada seluruh pegawai untuk mulai menyiapkan program 2024 dan dipertajam agar terealisasi dengan optimal.

Nurdin, menyebut, percepatan realisasi program-program tersebut juga dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Tangerang, Banten dalam mewujudkan kota yang sejahtera, berakhlakul karimah dan berdaya saing.

"Pembangunan dan pelayanan tidak hanya berfokus pada fisik saja, tetapi juga dalam hal pembangunan SDM. Maka dari itu program-program yang dipersiapkan juga harus mempertimbangkan terwujudnya kualitas SDM yang unggul dan berkelanjutan," kata Nurdin saat memimpin rapat perdana bersama para Kepala Perangkat Daerah beserta camat, lurah, usai apel di Ruang Rapat Akhlakul Karimah Pemkot Tangerang, Rabu.

Selain percepatan realisasi program, ia juga menekankan pentingnya mitigasi bencana dan kegawatdaruratan. "Peningkatan banjir terutama ya, harus jadi perhatian lebih, diperluas lagi area mitigasi. Koordinasikan dengan pihak-pihak terkait termasuk juga agar masyarakat bisa dilibatkan," ujarnya.

Sebelum memimpin rapat, Nurdin yang juga hadir sebagai pembina apel pegawai meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar saling mendukung dalam melanjutkan pelayanan dan pembangunan selama masa transisi.

"Untuk itu selaku Penjabat Wali Kota Tangerang di masa transisi ini, dirinya mengajak agar seluruh OPD

dapat saling dukung agar keberlanjutan pembangunan dapat berjalan dengan optimal," katanya.

Untuk itu, Nurdin yang juga masih menjabat sebagai Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), dirinya ingin ada perencanaan yang matang dalam pelaksanaan setiap program pelayanan dan pembangunan di Kota Tangerang.

"Kinerja-kinerja serta inovasi-inovasi yang sudah berjalan baik tolong dipertahankan dan dipertajam agar dapat lebih berdampak kepada masyarakat. Dan hal tersebut tentunya butuh kolaborasi dan sinergi dari semua pihak khususnya dalam hal perencanaan agar pelaksanaannya juga lebih optimal," katanya.

Sementara Asda I Kota Tangerang, Deni Koswara mengatakan, Pj Wali Kota Tangerang, Nurdin akan melanjutkan program-program dan tidak akan mengubah tatanan pemerintahan dan kebijakan yang sudah ada.

Seperti pada program manajemen ASN, pelayanan terbaik, dan perencanaan anggaran tahun 2024.

Tak hanya itu, Nurdin pun berharap kepada seluruh pegawai untuk dapat berkolaborasi bersama dalam membangun Kota Tangerang lebih baik.

"Tentu harapan kedepannya di bawah kepemimpinannya yang baru ini, dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan diharapkan seluruh pegawai Pemkot Tangerang dapat mendukung segala keputusan dari Pj Wali Kota Tangerang," ujarnya. ● pp

## PENERBANGAN BALON TRADISIONAL DI BUKIT SEROJA

Sejumlah pengunjung menyaksikan penerbangan balon tradisional di Kahyangan Sky View kawasan lereng Bukit Seroja, Desa Maron, Garung Wonosobo, Jateng, Kamis (28/12). Penerbangan belasan balon tradisional berukuran besar di kawasan wisata alam Telaga Menjer tersebut sebagai atraksi wisata untuk menarik pengunjung saat musim libur Natal dan Tahun Baru 2024.



## NURDIN DILANTIK JADI PJ WALI KOTA TANGERANG

# Pengamat Nilai Pusat Anggap Remeh Pejabat Daerah

Wilayah Kota Tangerang kompleksitasnya berbeda dengan Lebak dan Serang. Sehingga perlu pejabat yang memahami persoalan. Kualitas sosok Pj Wali Kota Tangerang ini belum teruji dalam memimpin organisasi yang lebih besar, sehingga pemerintah pusat terkesan menganggap remeh kualitas pejabat daerah, kata Pengamat Kebijakan Publik, Miftahul Adib.

**SERANG (IM)** - Pemerintah pusat telah menunjuk Nurdin menjadi Pj Wali Kota

Tangerang dan telah dilantik pada 26 Desember 2023 di Pendopo Gubernur Banten.

## Kasus Dugaan Korupsi Hibah KONI Banten Dihentikan

**SERANG (IM)** - Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Banten menghentikan dua perkara dugaan korupsi tindak pidana korupsi selama 2023. Kedua dugaan korupsi itu yakni penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Banten tahun anggaran 2022 dan pengadaan video wall di Sekretariat DPRD Banten.

Kepala Kejati Banten, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi dana hibah KONI Banten dihentikan karena adanya pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 439 juta. "Memang ada yang kita hentikan, KONI ada kerugian karena kita lakukan penyelidikan tiba-tiba langsung telah mengembalikan ke kas negara Rp 439 juta," kata Didik kepada wartawan di kantornya, Kamis (28/12).

Kasus dugaan korupsi pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di

Kota Tangerang tahun 2022 ini penyidik telah melakukan serangkaian pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi. Didik menjelaskan, ketika sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara kasus dugaan korupsi dapat dihentikan.

Penghentian penyelidikan itu, kata Didik sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus). Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 10 Mei 2010 dan Nomor 765/Fd.1/04/2018. "Memang ketika kita sudah ada pengembalian dapat dihentikan, terus tenaga kita terbatas sehingga bisa menyelidiki yang lain kalau sudah dihentikan," ujar Didik.

Sedangkan kasus dugaan korupsi pengadaan video wall di lobi gedung DPRD Banten dihentikan karena penyidik menilai tidak ada perbuatan melawan hukumnya. "Kalau video wall setelah kita selidiki tidak ada indikasi korupsi, sehingga kita hentikan," kata dia. ● pra

Berdasarkan informasi, pelantikan Nurdin menjadi Pj Wali Kota Tangerang, ternyata masih aktif menjabat Pj Bupati Aceh Jaya.

Dampaknya, saat ini Pj Bupati Aceh Jaya mengalami kekosongan jabatan karena ditinggalkan Nurdin.

Pengamat Kebijakan Publik, Miftahul Adib menilai, Kemendagri terkesan coba-coba dalam pengisian penjabat (Pj).

Apalagi, penunjukan Nurdin sebagai Pj Wali Kota Tangerang saat masih aktif menjabat Pj Bupati Aceh Jaya.

Hal itu dianggap pemerintah pusat menganggap remeh kualitas pejabat daerah.

"Saya melihat Kemendagri ini atau pemerintah pusat terkesan coba-coba atau menganggap remeh soal kualitas

pejabat daerah," katanya, Kamis (28/12).

Dengan dipindahtugaskan Nurdin jadi Pj Wali Kota Tangerang, sesuatu hal yang tidak baik dan terkesan dipaksakan.

"Kalau informasinya betul bahwa beliau masih menjabat Pj Bupati Aceh Jaya ini menurut saya sungguh sangat tidak baik. Masih menjabat di sana, digeser ke sini. Berarti stok di Kemendagri ini terlalu dipaksakan," ucapnya.

Ditambah, kualitas sosok Pj Wali Kota Tangerang belum teruji dalam memimpin organisasi yang lebih besar.

Dengan kondisi itu, pihaknya cunga Pj yang ditunjuk pemerintah pusat hanya dijadikan ban serep atau kepanjangan tangan yang tak terlihat untuk kepentingan politik.

"Jangan-jangan Pj hanya dijadikan ban serep saja sebenarnya. Udahlah sana gunting pita, toh cuma setahun. Sering saya katakan juga, Bisa kita menduga dia kepanjangan tangan dari kepentingan tangan tak terlihat untuk kepentingan politik," terangnya.

Apalagi, wilayah Kota Tangerang kompleksitasnya berbeda dengan daerah Lebak, Serang.

Sehingga perlu pejabat yang memahami persoalan bukan hanya sekadar retorika.

"Saya mulai meragukan, terkesan pejabat hanya di pingpong sana sini, ujungnya pemerintah pusat nggak mau dari internal yang memahami persoalan," pungkasnya. ● pp



## BRGM BERDAYAKAN WANITA MELALUI BUDIDAYA JAMUR TIRAM

Ketua Kelompok Wanita Tani Mandiri Latifah menunjukkan hasil panen jamur tiram di Desa Anjir Kalampan, Kab. Kapuas, Kalteng, Rabu (27/12). Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) memberdayakan sejumlah wanita di desa itu untuk budidaya jamur tiram guna meningkatkan perekonomian warga dan hasil keuntungan usaha itu sekitar 10 persen diberikan kepada Masyarakat Peduli Api Tunas Jaya untuk pembasahan lahan gambut guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

## Tahun 2023, DPRD dan Pemkot Tangsel Rampungkan 10 Perda

**TANGSEL (IM)** - DPRD Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersama Pemkot Tangsel merampungkan 10 Peraturan Daerah (Perda) selama tahun 2023.

Tersisa sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang belum diselesaikan.

Ketua Bapemperda DPRD Tangsel, Ledy MP Butar Butar mengaku, Bapemperda belum maksimal dalam membentuk perda selama 2023 lantaran hanya mampu merampungkan 10 perda.

"Memang kita belum 100 persen mencapai target, tapi di tiap tahun capaiannya di atas 50 persen," ujar Ledy dalam acara coffee morning bersama wartawan DPRD Tangsel, Kamis (28/12).

Menurut Ledy, Perda yang telah disahkan DPRD Tangsel bersama Walikota Tangsel membutuhkan sosialisasi ke masyarakat, sayangnya DPRD Kota Tangsel tidak memiliki ke-

wenangan dalam menyosialisasikan perda yang sudah disahkan.

"Tidak seperti DPR RI, kami tidak memiliki kewenangan dalam menyosialisasikan perda, ini menjadi koreksi," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Bapemperda DPRD Tangsel, Wawan Syakir Darmawan menambahkan, sejumlah perda yang rampung disahkan memang sudah ditargetkan, seperti harmonisasi UU Ciptaker yang menjadi prioritas pembahasan dan harmonisasi.

### Berikut daftar Raperda yang dibahas selama tahun 2023:

1. Raperda Bangunan Gedung, Pengusul Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
2. Raperda Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, pengusul Dinas Ketenagakerjaan.
3. Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengusul Dinas Lingkungan Hidup
4. Raperda Perubahan

atas Perda No.5 Tahun 2015 Tentang Perikanan, pengusul Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

5. Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, pengusul Badan Pendapatan Daerah.

6. Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Pemukiman, pengusul Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan

7. Raperda Penyelenggara Perhubungan, pengusul Dinas Perhubungan

8. Raperda Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengusul Satuan Polisi Pamong Praja.

9. Raperda Sistem Kesehatan Kota, pengusul Dinas Kesehatan

10. Raperda Perubahan Bentuk BUMD, pengusul bagian ekonomi dan kesekretarian daerah

11. Raperda Pengelola Jasa Lingkungan Hidup, pengusul DPRD Kota Tangerang Selatan

12. Raperda Fasilitas Penyelenggara Ibadah Haji, pengusul DPRD Kota Tangerang Selatan

13. Raperda Fasilitas Pe-

nyelenggara Ponpes, pengusul DPRD Kota Tangerang Selatan

14. Raperda Perlindungan, pembinaan serta pengawasan produk halal dan higienis, pengusul DPRD Kota Tangerang Selatan

15. Raperda Pemajuan Kebudayaan, pengusul DPRD Kota Tangerang Selatan

16. Raperda Penyelenggara dan Pengelolaan pasar rakyat, pengusul DPRD Kota Tangerang Selatan

17. Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, pengusul BPKAD

18. Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2024, pengusul BPKAD

19. Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, pengusul Bapeda

Raperda yang telah selesai pembahasan:

1. Raperda Bangunan

Gedung

2. Raperda Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

3. Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Raperda Perubahan atas Perda No.5 Tahun 2015 Tentang Perikanan

5. Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

6. Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Pemukiman

7. Raperda Perubahan Bentuk BUMD diusulkan Pemerintah Daerah melalui bagian ekonomi dan kesekretarian daerah

8. Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

9. Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

10. Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022. ● pp